



PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR

2023

---

# PERUBAHAN RENJA

---

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 367 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Provinsi yang telah diverifikasi dan disempurnakan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 18);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023.**

**Pasal 1**

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 selanjutnya disebut P-Renja PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

## Pasal 2

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
- BAB I. Pendahuluan;
  - BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
  - BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan; dan
  - BAB IV. Penutup.
- (2) P-Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 3

P-Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- t. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- u. Dinas Pariwisata;
- v. Dinas Perkebunan;
- w. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- x. Dinas Kehutanan;
- y. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- z. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- aa. Sekretariat Daerah;

- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 31 Agustus 2023  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 31 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 39.



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>I</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>II</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 LANDASAN HUKUM .....	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN .....	6
<b>BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023.</b>	<b>7</b>
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023 .....	7
<b>BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>30</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>40</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> Tujuan dan Sasaran pada Renstra dan Renja BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur .....	8
<b>Tabel 2.2</b> Konsistensi Progam/Kegiatan/Subkegiatan Renja Bappeda Tahun 2023 dengan APBD Bappeda Tahun 2023 .....	9
<b>Tabel 2.3</b> Rekapitulasi Gambaran Konsistensi Progam/Kegiatan/Subkegiatan Renja Bappeda Tahun 2023 dengan APBD Bappeda Tahun 2023 .....	19
<b>Tabel 2.4</b> Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 .....	21
<b>Tabel 3.1</b> Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 .....	31



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, yaitu jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan yang disusun untuk melaksanakan rencana tahun kelima Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019-2023. Renja dan Renstra merupakan dokumen yang disusun untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian target pembangunan yang telah direncanakan pada RPJMD tahun 2019-2023 dan RKPD tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan penjabaran dari Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. Hal ini juga sejalan dengan bunyi pasal 343 ayat 1 Pemendagri 86 tahun 2017 yang menyatakan bahwa

Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi :

- a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan atau
- b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun berjalan sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

selain itu perubahan Renja juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja dilakukan secara simultan dengan Perubahan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada :

- a. Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023; dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Bappeda hingga triwulan II tahun 2023.

Proses penyusunan Perubahan Renja Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan yakni : a) penyusunan rancangan perubahan Renja; b) perumusan rancangan akhir perubahan Renja; dan c) penetapan perubahan Renja.

Dokumen Perubahan Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sehingga penetapan target tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renja harus mendukung percepatan pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023. Selanjutnya Perubahan Renja dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2023 dan Dokumen

Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2023 melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Perubahan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Perubahan Renja adalah untuk melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan Program/Kegiatan/Sub kegiatan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Selain untuk menyesuaikan target kinerja dan pagu program/kegiatan/sub kegiatan, penyusunan Perubahan Renja juga bertujuan sebagai pedoman perangkat daerah dalam Menyusun perubahan RKA dan dasar dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Prov. Kaltim hingga akhir tahun anggaran 2023.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 disusun dengan sistematika dan penjelasan sebagai berikut :

- BAB I      Pendahuluan;  
              Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen Perubahan Renja.
- BAB II     Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023;  
              Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 pada Triwulan I dan Triwulan II.
- BAB III    Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah;  
              Memuat Tujuan dan Sasaran perangkat daerah serta program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2023 yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan.
- BAB IV    Penutup.  
              Memuat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2023.

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

Evaluasi merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan untuk mengetahui capaian kinerja pelayanan Bappeda melalui pencapaian target tujuan dan sasaran perangkat daerah pada tahun 2023 serta capaian program/kegiatan/subkegiatan yang telah ditetapkan pada Renja tahun 2023. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2023 diharapkan mampu mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dan pada dokumen perencanaan menengah perangkat daerah yakni Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023**

Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun kelima Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 yang dilaksanakan melalui pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Pelaksanaan ini harus mengedepankan konsistensi pelaksanaan perencanaan perangkat daerah yang telah ditetapkan, terhadap perubahan kemampuan sumber daya pada pelaksanaan akan berdampak pada penyesuaian target yang telah direncanakan.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 yang dilaksanakan bertujuan untuk menjamin konsistensi pelaksanaan antara dengan RKA-PD dan Renja-PD; memastikan realisasi target kinerja (output) dan penyerapan dana sub kegiatan Renja; mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran Renja; melakukan koreksi atas penyimpangan kegiatan serta akselerasi atas keterlambatan dalam realisasi pelaksanaan Renja.

Konsistensi pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 20223 terhadap pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran pada Renstra dan Renja  
BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Pada Tahun 2023		Reliasasi Tahun 2023
			Renstra	Renja	
1	2	3	4	5	6
1	Tujuan : Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	78	78	-*
2	Sasaran 1 : Terwujudnya capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah	Persentase Prioritas Pembangunan yang mencapai target	95	95	-*
3	Sasaran 2 : Rencana Program dan Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	Persentase program/ kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PSDM dan Bidang Infrastruktur Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran	95	95	99,35**
4	Sasaran 3 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda secara Internal dan Eksternal	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda Prov. Kaltim	79,55	79,55	81,64**

Keterangan :

\* = capaian indikator diukur pada akhir pelaksanaan renja

\*\* = capaian sementara hingga semester pertama

Terdapat kesesuaian tujuan dan sasaran serta target kinerja yang telah ditetapkan pada pada tahun kelima Renstra (tahun 2023) dengan yang ditetapkan pada Renja 2023. Hal ini sebagai upaya dalam menjaga keselarasan dalam pencapaian target pembangunan perangkat daerah.

Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 diharuskan untuk selaras dengan yang akan dilaksanakan melalui APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023. Program/ Kegiatan/Subkegiatan yang dilaksanakan pada APBD tahun anggaran 2023 harus telah direncanakan pada Renja tahun 2023 dan tidak ada penambahan program/kegiatan/subkegiatan. Secara rinci gambaran pelaksanaan Renja tahun 2023 pada APBD Tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut berikut:



Tabel 2.2  
Konsistensi Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Bappeda Tahun 2023 dengan APBD Bappeda Tahun 2023

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Renja Tahun 2023			APBD Tahun Anggaran 2023			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				<b>54.381.973.000</b>				<b>60.867.730.869</b>
<b>5.01.001</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Skor Kepuasan Masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda</b>	<b>90%</b>	<b>31.338.747.940</b>	<b>Skor Kepuasan Masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda</b>	<b>90%</b>	<b>36.810.523.269</b>	<b>Konsisten</b>
<b>5.01.001.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Bappeda yang tepat waktu, tepat proses</b>	<b>95%</b>	<b>606.750.000</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Bappeda yang tepat waktu, tepat proses</b>	<b>95%</b>	<b>807.098.500</b>	<b>Konsisten</b>
5.01.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	87.810.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	307.145.000	Inkonsistensi pada Target Kinerja
5.01.001.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	31.101.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	48.332.500	Konsisten
5.01.001.1.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	36.358.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	48.905.000	Konsisten
5.01.001.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	132.027.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	167.190.000	Konsisten

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Renja Tahun 2023			APBD Tahun Anggaran 2023			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	319.454.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	235.526.000	Inkonsistensi pada Target Kinerja
<b>5.01.001.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur</b>	<b>96%</b>	<b>18.259.201.608</b>	<b>Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur</b>	<b>96%</b>	<b>18.345.066.758</b>	<b>Konsisten</b>
5.01.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/Bulan	17.321.401.608	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/Bulan	17.321.466.758	Konsisten
5.01.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	933.121.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.018.921.000	Konsisten
5.01.001.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	4.679.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	4.679.000	Konsisten
<b>5.01.001.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase SDM Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi</b>	<b>50%</b>	<b>667.040.000</b>	<b>Persentase SDM Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi</b>	<b>50%</b>	<b>243.450.000</b>	<b>Konsisten</b>
5.01.001.1.05.002	Pengadaan Pakainan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakainan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	277.040.000	Jumlah Paket Pakainan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	63.630.000	Inkonsistensi pada Target Kinerja
5.01.001.1.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	390.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27 Orang	179.820.000	Inkonsistensi pada Target Kinerja

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Renja Tahun 2023			APBD Tahun Anggaran 2023			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>5.01.001.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang Berfungsi Baik</b>	<b>95%</b>	<b>3.080.108.000</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang Berfungsi Baik</b>	<b>95%</b>	<b>4.868.022.200</b>	<b>Konsisten</b>
5.01.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	267.843.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	100.034.500	Inkonsistensi pada Target Kinerja
5.01.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	302.648.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2.077.349.300	Inkonsistensi pada Target Kinerja
5.01.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	383.156.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	262.918.200	Inkonsistensi pada Target Kinerja
5.01.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	185.953.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	187.368.000	Konsisten
5.01.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Pengaturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Disediakan	1 Dokumen	59.520.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Disediakan	1 Dokumen	60.115.200	Konsisten
5.01.001.1.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	24.912.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	24.912.000	Konsisten
5.01.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.485.600.000	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.896.600.000	Konsisten
5.01.001.1.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik SKPD	4 Dokumen	370.476.000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik SKPD	4 Dokumen	258.725.000	Konsisten
<b>5.01.001.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Sarana dan Prasarana</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>546.797.100</b>	<b>Tersedianya Sarana dan Prasarana</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>1.670.618.300</b>	<b>Konsisten</b>

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Renja Tahun 2023			APBD Tahun Anggaran 2023			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.001.1.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	546.797.100	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	1.670.618.300	Inkonsistensi pada Target Kinerja
<b>5.01.001.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang tepat waktu</b>	<b>95%</b>	<b>6.082.224.232</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang tepat waktu</b>	<b>95%</b>	<b>6.845.432.400</b>	<b>Konsisten</b>
5.01.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.000.000	Konsisten
5.01.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.465.312.560	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.465.736.400	Konsisten
5.01.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.601.911.672	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.364.696.000	Konsisten
<b>5.01.001.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang Digunakan dan Berfungsi Baik</b>	<b>90%</b>	<b>2.096.627.000</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang Digunakan dan Berfungsi Baik</b>	<b>90%</b>	<b>4.030.835.111</b>	<b>Konsisten</b>
5.01.001.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	79.998.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	100.064.000	Konsisten
5.01.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan pajak dan Perizinannya	47 Unit	908.276.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan pajak dan Perizinannya	69 Unit	918.702.000	Inkonsistensi pada Target Kinerja
5.01.001.1.09.005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Dipelihara	25 Unit	19.200.000	Jumlah Mebel Dipelihara	20 Unit	19.200.000	Inkonsistensi pada Target Kinerja

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Renja Tahun 2023			APBD Tahun Anggaran 2023			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	53.865.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	144.444.000	Inkonsistensi pada Target Kinerja
5.01.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	704.318.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	2.675.925.111	Konsisten
5.01.001.1.09.010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	330.970.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	172.500.000	Konsisten
<b>5.01.002</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan</b>	<b>80%</b>	<b>12.593.225.060</b>	<b>Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan</b>	<b>80%</b>	<b>13.085.713.100</b>	<b>Konsisten</b>
<b>5.01.002.1.01</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan</b>	<b>95%</b>	<b>4.758.439.000</b>	<b>Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan</b>	<b>95%</b>	<b>5.202.317.300</b>	<b>Konsisten</b>
5.01.002.1.01.001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJPD/RPJMD	1 Dokumen	408.600.000	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJPD/RPJMD	1 Dokumen	301.898.000	Konsisten
5.01.002.1.01.003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3 Berita Acara	591.431.000	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3 Berita Acara	584.861.000	Konsisten
5.01.002.1.01.005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Murenbang Provinsi	2 Berita Acara	662.181.000	Jumlah Berita Acara Murenbang Provinsi	1 Berita Acara	567.335.000	Inkonsistensi pada Target Kinerja
5.01.002.1.01.006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 Dokumen	3.096.227.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3.748.223.300	Inkonsistensi pada Target Kinerja

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Renja Tahun 2023			APBD Tahun Anggaran 2023			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>5.01.002.1.02</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan</b>	<b>98%</b>	<b>1.699.999.900</b>	<b>Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan</b>	<b>98%</b>	<b>1.779.672.800</b>	<b>Konsisten</b>
5.01.002.1.02.001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data pembangunan	2 Dokumen	670.098.400	Jumlah Dokumen Analisis Data pembangunan	2 Dokumen	766.771.300	Konsisten
5.01.002.1.02.002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	92 Orang	578.618.500	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	92 Orang	578.618.500	Konsisten
5.01.002.1.02.003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	30 Orang	276.818.000	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	30 Orang	276.818.000	Konsisten
5.01.002.1.02.004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah	3 Dokumen	174.465.000	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah	3 Dokumen	157.465.000	Konsisten
<b>5.01.002.1.03</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan</b>	<b>90%</b>	<b>6.134.786.160</b>	<b>Persentase Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan</b>	<b>90%</b>	<b>6.103.723.000</b>	<b>Konsisten</b>
5.01.002.1.03.001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	4.407.195.160	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	4.447.516.000	Konsisten
5.01.002.1.03.003	Monitoring, Evaluasi dan penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	806.985.000	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	791.985.000	Konsisten

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Renja Tahun 2023			APBD Tahun Anggaran 2023			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.002.1.03.004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/ Evaluasi	4 Dokumen	920.606.000	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/ Evaluasi	4 Dokumen	864.222.000	Konsisten
<b>5.01.003</b>	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase program/kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</b>	<b>95%</b>	<b>10.450.000.000</b>	<b>Persentase program/kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</b>	<b>95%</b>	<b>10.971.494.500</b>	<b>Konsisten</b>
<b>5.01.03.1.01</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA &amp; RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</b>	<b>100%</b>	<b>2.950.000.000</b>	<b>Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA &amp; RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</b>	<b>100%</b>	<b>3.408.670.000</b>	<b>Konsisten</b>
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	670.809.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	631.856.100	Konsisten
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra /Renja Bidang Pemerintahan	10 Perangkat Daerah	259.457.000	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra /Renja Bidang Pemerintahan	10 Perangkat Daerah	346.845.700	Konsisten

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Renja Tahun 2023			APBD Tahun Anggaran 2023			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang pemerintahan	1 Laporan	169.734.000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang pemerintahan	1 Laporan	357.962.700	Konsisten
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	925.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	1.126.368.500	Konsisten
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	925.000.000	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	945.637.000	Konsisten
<b>5.01.03.1.02</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA &amp; RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</b>	<b>97%</b>	<b>4.600.000.000</b>	<b>Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA &amp; RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</b>	<b>97%</b>	<b>4.503.446.500</b>	<b>Konsisten</b>



Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Renja Tahun 2023			APBD Tahun Anggaran 2023			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	638.974.000	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	579.498.000	Konsisten
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra /Renja Bidang Perekonomian	9 Perangkat Daerah	182.146.000	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra /Renja Bidang Perekonomian	9 Perangkat Daerah	177.766.000	Konsisten
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	928.880.000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	959.880.000	Konsisten
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	327.330.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	325.329.800	Konsisten
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA	3 Perangkat Daerah	176.970.000	Jumlah perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA	3 Perangkat Daerah	131.827.500	Konsisten
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Dokumen	2.345.700.000	Jumlah Laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Dokumen	2.329.145.200	Konsisten

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Renja Tahun 2023			APBD Tahun Anggaran 2023			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.03.1.03	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA &amp; RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</b>	<b>97%</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA &amp; RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</b>	<b>97%</b>	<b>3.059.378.000</b>	<b>Konsisten</b>
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	934.709.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1.046.429.000	Konsisten
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah	1.032.891.000	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah	1.018.849.000	Konsisten
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	932.400.000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	994.100.000	Konsisten

Berdasarkan Renja Bappeda Tahun 2023, terdapat 3 program, 13 kegiatan dan 53 sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada APBD tahun anggaran 2023. Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan pada Renja dilaksanakan pada APBD. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3  
Rekapitulasi Gambaran Konsistensi Progam/Kegiatan/Subkegiatan Renja Bappeda Tahun 2023 dengan APBD Bappeda Tahun 2023

No	Uraian	Program	Kegiatan	Subkegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Konsisten	3	13	40
2	Inkonsistensi pada indikator dan target kinerja	0	0	0
3	Inkonsistensi pada Indikator Kinerja	0	0	0
4	Inkonsistensi pada target kinerja	0	0	13
5	Tidak dilaksanakan	0	0	0
	Jumlah	3	13	53

Berdasarkan tabel di atas, terdapat inkonsistensi pada 13 sub kegiatan karena adanya perbedaan target kinerja pada dokumen renja dengan pelaksanaan APBD. Adapun penyebab inkonsistensi yang terjadi pada pelaksanaan renja yang dimaksud karena :

1. Terdapat peningkatan alokasi pagu anggaran pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 6.485.757.869 atau sebesar 11,93 persen yang menyebabkan adanya penambahan pagu pada beberapa sub kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas Bappeda;
2. Inkonsistensi dikarenakan kesalahan dalam perumusan target kinerja pada tahap penyusunan Renja tahun 2023;

Adanya inkonsistensi dalam pelaksanaan Renja BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 pada APBD Tahun Anggaran 2023 akan menjadi catatan yang harus diperbaiki dan ditindak lanjuti dalam perubahan Renja tahun 2023 serta menjadi catatan dalam penyusunan Renja tahun berikutnya. Konsistensi perencanaan dengan penganggaran harus

diwujudkan untuk menjamin perencanaan yang dilakukan lebih berkualitas, tepat dan terarah.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2023 bertujuan untuk memastikan pagu indikatif yang telah dianggarkan pada APBD tahun 2023 atau DPA tahun 2023 telah efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja (output) yang telah direncanakan pada Renja serta memastikan target kinerja sub kegiatan yang telah direncanakan efektif dalam pencapaian target kinerja pada kegiatan dan program.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2023 sampai dengan triwulan II ini diharapkan akan menjadi bahan untuk penyusunan perubahan Renja tahun 2023, sehingga rencana pembangunan yang ditetapkan dapat direalisasikan pada tahun 2023.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2023 sampai dengan triwulan II tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4  
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023			Realisasi 2023				Rasio/Tingkat Capaian Realisasi 2023		Predikat s.d. Juni	
						Maret		Juni		Juni			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16
	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				<b>64.567.730.869</b>	<b>8.057.716.906</b>		<b>22.021.807.422</b>			<b>34,11</b>		<b>SR</b>
<b>5.01.001</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Skor Kepuasan Masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda</b>	<b>90</b>	<b>%</b>	<b>36.810.523.269</b>	<b>83,4</b>	<b>5.496.598.534</b>	<b>81,64</b>	<b>14.625.916.284</b>	<b>90,71</b>	<b>39,73</b>	<b>T</b>	<b>SR</b>
<b>5.01.001.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Bappeda yang tepat waktu, tepat proses</b>	<b>95</b>	<b>%</b>	<b>807.098.500</b>	<b>28,57</b>	<b>190.542.313</b>	<b>42,86</b>	<b>349.470.265</b>	<b>45,12</b>	<b>43,30</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>
5.01.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	307.145.000	0	103.726.600	1	189.513.972	33,33	61,70	SR	R
5.01.001.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	48.332.500	1	3.210.000	1	3.210.000	50,00	6,64	SR	SR
5.01.001.1.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	48.905.000	1	3.180.000	1	3.180.000,00	50,00	6,50	SR	SR
5.01.001.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	167.190.000	1	80.425.713	1	106.643.193	50,00	63,79	SR	R
5.01.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	235.526.000	0	-	0	46.923.100	0,00	19,92	SR	SR
<b>5.01.001.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur</b>	<b>96</b>	<b>%</b>	<b>18.345.066.758</b>	<b>13,24</b>	<b>2.708.189.388</b>	<b>40,79</b>	<b>7.483.649.462</b>	<b>42,49</b>	<b>40,79</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>
5.01.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90	Orang/ Bulan	17.321.466.758	84	2.489.070.768	84	7.004.856.542	93,33	40,44	ST	SR
5.01.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	1.018.921.000	3	218.641.120	3	476.680.920	25,00	46,78	SR	SR

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023			Realisasi 2023				Rasio/Tingkat Capaian Realisasi 2023		Predikat s.d. Juni	
						Maret		Juni		Juni			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16
5.01.001.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18	Laporan	4.679.000	4	477.500	4	2.112.000	22,22	45,14	SR	SR
<b>5.01.001.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase SDM Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi</b>	<b>50</b>	<b>%</b>	<b>243.450.000</b>	<b>22,22</b>	<b>36.000.000</b>	<b>100</b>	<b>163.321.950</b>	<b>200</b>	<b>67,09</b>	<b>ST</b>	<b>S</b>
5.01.001.1.05.002	Pengadaan Pakainan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakainan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	Paket	63.630.000	0	0	1	61.321.950	100	96,37	ST	ST
5.01.001.1.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27	Orang	179.820.000	6	36.000.000	27	102.000.000	100	56,72	ST	R
<b>5.01.001.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang Berfungsi Baik</b>	<b>95</b>	<b>%</b>	<b>4.868.022.200</b>	<b>90</b>	<b>1.058.562.184</b>	<b>90</b>	<b>2.586.235.171</b>	<b>94,74</b>	<b>53,13</b>	<b>ST</b>	<b>R</b>
5.01.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13	Paket	100.034.500	13	47.173.500	13	88.688.000	100	88,66	ST	T
5.01.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	2.077.349.300	5	647.622.200	5	1.717.510.050	83,33	82,68	T	T
5.01.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	262.918.200	5	94.891.700	5	160.575.350	100	61,07	ST	R
5.01.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	187.368.000	5	32.495.000	5	51.064.000	100	27,25	ST	SR
5.01.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Pengaturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Disediakan	1	Dokumen	60.115.200	0	9.272.000	1	23.360.000	100	38,86	ST	SR
5.01.001.1.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	24.912.000	0	0	0	0	0	0,00	SR	SR
5.01.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	1.896.600.000	0	227.107.784	0	545.037.771	0	28,74	SR	SR

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023			Realisasi 2023				Rasio/Tingkat Capaian Realisasi 2023		Predikat s.d. Juni	
						Maret		Juni		Juni			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16
5.01.001.1.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik SKPD	4	Dokumen	258.725.000	0	0	0	0	0	0,00	SR	SR
<b>5.01.001.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Sarana dan Prasarana</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>1.670.618.300</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>495.100.000</b>	<b>50</b>	<b>29,64</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>
5.01.001.1.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Disediakan	6	Unit	1.670.618.300	0	0	1	495.100.000	16,67	29,64	SR	SR
<b>5.01.001.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang tepat waktu</b>	<b>95</b>	<b>%</b>	<b>6.845.432.400</b>	<b>95</b>	<b>1.384.240.148</b>	<b>100</b>	<b>3.119.305.615</b>	<b>105,26</b>	<b>45,57</b>	<b>ST</b>	<b>SR</b>
5.01.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	15.000.000	0	4.500.000	1	15.000.000	100	100	ST	ST
5.01.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	1.465.736.400	0	217.710.976	1	416.826.765	100	28,44	ST	SR
5.01.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	5.364.696.000	0	1.162.029.172	1	2.687.478.850	100	50,10	ST	SR
<b>5.01.001.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang Digunakan dan Berfungsi Baik</b>	<b>90</b>	<b>%</b>	<b>4.030.835.111</b>	<b>75</b>	<b>119.064.501</b>	<b>60</b>	<b>428.833.821</b>	<b>66,67</b>	<b>10,64</b>	<b>R</b>	<b>SR</b>
5.01.001.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	Unit	100.064.000	2	0	2	5.950.000	100	5,95	ST	SR
5.01.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan pajak dan Perizinannya	69	Unit	918.702.000	69	58.299.501	50	281.743.967	72,46	30,67	S	SR
5.01.001.1.09.005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Dipelihara	20	Unit	19.200.000	0	0	0	0	0	0,00	SR	SR
5.01.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	Unit	144.444.000	20	0	18	14.590.000	60	10,10	R	SR
5.01.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	2.675.925.111	1	0	1	47.764.854	100	1,78	ST	SR

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023			Realisasi 2023				Rasio/Tingkat Capaian Realisasi 2023		Predikat s.d. Juni	
						Maret		Juni		Juni			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16
5.01.001.1.09.010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	Unit	172.500.000	2	60.765.000	4	78.785.000	100	45,67	ST	SR
<b>5.01.002</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan</b>	<b>80</b>	<b>%</b>	<b>13.085.713.100</b>	<b>0</b>	<b>1.383.180.117</b>	<b>62,21</b>	<b>3.866.118.290</b>	<b>77,76</b>	<b>29,54</b>	<b>T</b>	<b>SR</b>
<b>5.01.002.1.01</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan</b>	<b>95</b>	<b>%</b>	<b>5.202.317.300</b>	<b>0</b>	<b>260.726.400</b>	<b>97,64</b>	<b>1.342.744.250</b>	<b>102,78</b>	<b>25,81</b>	<b>ST</b>	<b>SR</b>
5.01.002.1.01.001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJPD/RPJMD	1	Dokumen	301.898.000	0	0	0	0	0	0	SR	SR
5.01.002.1.01.003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3	Berita Acara	584.861.000	2	77.250.000	2	381.996.000	65,31	65,31	R	R
5.01.002.1.01.005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Murenbang Provinsi	2	Berita Acara	567.335.000	0	0	1	115.257.000	20,32	20,32	SR	SR
5.01.002.1.01.006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3	Dokumen	3.748.223.300	0	183.476.400	2	845.491.250	22,56	22,56	SR	SR
<b>5.01.002.1.02</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>1.779.672.800</b>	<b>0</b>	<b>178.981.880</b>	<b>0</b>	<b>456.906.905</b>	<b>0</b>	<b>25,67</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>
5.01.002.1.02.001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data pembangunan	2	Dokumen	766.771.300	0	159.397.080	0	183.775.105	0	23,97	SR	SR
5.01.002.1.02.002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	92	Orang	578.618.500	92	0	92	73.022.500	100	12,62	ST	SR
5.01.002.1.02.003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	30	Orang	276.818.000	30	19.584.800	30	192.353.300	100	69,49	ST	S



Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023			Realisasi 2023				Rasio/Tingkat Capaian Realisasi 2023		Predikat s.d. Juni	
						Maret		Juni		Juni			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16
5.01.002.1.02.004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah	3	Dokumen	157.465.000	0	0	0	7.756.000	0	4,93	SR	SR
<b>5.01.002.1.03</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan</b>	<b>90</b>	<b>%</b>	<b>6.103.723.000</b>	<b>0</b>	<b>943.471.837</b>	<b>89</b>	<b>2.066.467.135</b>	<b>98,89</b>	<b>33,86</b>	<b>ST</b>	<b>SR</b>
5.01.002.1.03.001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3	Laporan	4.447.516.000	0	943.471.837	1	2.016.547.135	33,33	45,34	SR	SR
5.01.002.1.03.003	Monitoring, Evaluasi dan penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2	Laporan	791.985.000	0	0	0	24.710.000	0	3,12	SR	SR
5.01.002.1.03.004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/ Evaluasi	4	Dokumen	864.222.000	0	0	2	25.210.000	50,00	2,92	SR	SR
<b>5.01.003</b>	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase program/kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPd) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</b>	<b>90</b>	<b>%</b>	<b>14.671.494.500</b>	<b>0</b>	<b>1.177.938.255</b>	<b>99,35</b>	<b>3.529.772.848</b>	<b>110,39</b>	<b>24,06</b>	<b>ST</b>	<b>SR</b>
<b>5.01.03.1.01</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPd, RENSTRA &amp; RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>3.908.670.000</b>	<b>0</b>	<b>429.876.354</b>	<b>99,74</b>	<b>1.250.611.126</b>	<b>99,74</b>	<b>32,00</b>	<b>ST</b>	<b>SR</b>
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	1	Dokumen	631.856.100	0	113.937.208	0	355.410.804	0	56,25	SR	R
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra /Renja Bidang Pemerintahan	10	Perangkat Daerah	346.845.700	10	52.929.096	10	138.453.490	100	39,92	ST	SR

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023			Realisasi 2023				Rasio/Tingkat Capaian Realisasi 2023		Predikat s.d. Juni	
						Maret		Juni		Juni			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang pemerintahan	1	Laporan	357.962.700	0	18.734.010	1	141.722.770	100	39,59	ST	SR
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	Dokumen	1.626.368.500	0	122.635.640	0	349.142.402	0	21,47	SR	SR
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	Laporan	945.637.000	0	121.640.400	0	265.881.660	0	28,12	SR	SR
<b>5.01.03.1.02</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA &amp; RENJAPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</b>	<b>97</b>	<b>%</b>	<b>7.703.446.500</b>	<b>0</b>	<b>493.577.177</b>	<b>99,34</b>	<b>1.436.730.980</b>	<b>102,41</b>	<b>18,65</b>	<b>ST</b>	<b>SR</b>
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	Dokumen	579.498.000	0	74.318.400	0	231.788.798	0	40,00	SR	SR
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra /Renja Bidang Perekonomian	9	Perangkat Daerah	177.766.000	9	33.687.200	9	67.284.000	100	37,85	ST	SR
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Perekonomian	2	Laporan	959.880.000	0	69.531.529	0	203.009.998	0	21,15	SR	SR
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	Dokumen	325.329.800	0	62.912.619	0	158.726.717	0	48,79	SR	SR

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023			Realisasi 2023				Rasio/Tingkat Capaian Realisasi 2023		Predikat s.d. Juni	
						Maret		Juni		Juni			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA	3	Perangkat Daerah	131.827.500	3	0	3	19.594.500	100	14,86	ST	SR
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1	Dokumen	5.529.145.200	0	253.127.429	0	756.326.967	0	13,68	SR	SR
<b>5.01.03.1.03</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA &amp; RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</b>	<b>97</b>	<b>%</b>	<b>3.059.378.000</b>	<b>0</b>	<b>254.484.724</b>	<b>97,1</b>	<b>842.430.742</b>	<b>100,10</b>	<b>27,54</b>	<b>ST</b>	<b>SR</b>
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	Dokumen	1.046.429.000	0	98.706.000	0	298.768.700	0	28,55	SR	SR
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2	Perangkat Daerah	1.018.849.000	2	63.723.020	2	230.123.638	100	22,59	ST	SR
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1	Laporan	994.100.000	0	92.055.704	0	313.538.404	0	31,54	SR	SR

Berdasarkan tabel 2.4 di atas masih terdapat beberapa kegiatan/sub kegiatan belum optimal yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat sebagai berikut:

1. Adanya penyesuaian penggunaan aplikasi SIPD dalam penatausahaan yang masih belum berjalan maksimal, juga terdapat beberapa fitur realisasi per belanja pada masing-masing sub kegiatan yang belum tersedia sehingga untuk mendapat data realisasi keuangan per belanja pada masing-masing sub kegiatan masih dilakukan secara manual atau tidak *by sistem*
2. Terdapat rencana kegiatan yang selalu mengalami pergeseran jadwal yang disebabkan penyesuaian agenda pimpinan
3. Padatnya jadwal kegiatan bidang PPEPD yang mengakibatkan beberapa pelaksanaan kegiatan pada seluruh bidang mengalami penundaan
4. Adanya kelebihan pagu anggaran pembayaran gaji dan tunjangan yang berefek pada tingkat realisasi keuangan Bappeda Prov. Kaltim
5. Kurang sesuainya proporsi pembagian Uang Persediaan (UP) kepada setiap KPA yang mengakibatkan lambatnya perputaran UP sehingga berimbas kepada terhambatnya pelaksanaan kegiatan di setiap bidang
6. Adanya beberapa belanja yang perlu dilakukan pergeseran anggaran, seperti belanja penyusunan rancangan teknokratik RPJMD yang tidak jadi dilaksanakan di tahun 2023 dan beberapa pekerjaan rehab dokumen RAB dan standar harga yang disusun belum sesuai dengan SHS.

Berdasarkan faktor penghambat yang menyebabkan rendahnya realisasi kinerja dan keuangan hingga triwulan II tahun 2023, beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan capaian dan memaksimalkan penggunaan anggaran untuk belanja yang lebih berkualitas yaitu:

1. Melakukan penyesuaian terhadap penggunaan aplikasi SIPD penatausahaan yang sebelumnya dilaksanakan melalui FMIS, begitu juga halnya mengenai rekap realisasi keuangan belanja per masing-masing sub kegiatan kiranya dapat dilakukan secara baik dengan koordinasi

yang baik antara penghubung dan bendahara pembantu masing-masing bidang

2. Koordinasi pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara baik dengan protokol pimpinan
3. Dalam mengatasi padatnya jadwal yang berpotensi berbenturannya kegiatan antar bidang maka perlu dilakukan penyusunan agenda kerja setiap masing-masing bidang untuk efektivitas kegiatan
4. Melakukan rasionalisasi terhadap belanja perjalanan dinas yang selanjutnya digeser ke belanja lain yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas
5. Melakukan perhitungan dan pergeseran anggaran terhadap kelebihan anggaran pembayaran gaji dan tunjangan yang disebabkan oleh sistem untuk dimanfaatkan ke belanja lain yang dibutuhkan
6. Perlu adanya kaji ulang oleh Tim TAPD untuk menindaklanjuti proporsi pembagian Uang Persediaan (UP) yang belum proporsional antara UP berdasarkan pagu anggaran dan intensitas kegiatan yang dilaksanakan
7. Melakukan pergeseran anggaran pada beberapa belanja yang belum dapat dilaksanakan serta mengusulkan SHS baru untuk beberapa belanja yang SHS nya masih belum sesuai.

Secara garis besar anggaran Bappeda Prov. Kaltim hingga triwulan II tahun 2023 masih belum terealisasi secara maksimal yang disebabkan oleh faktor-faktor penghambat yang telah dijelaskan pada paragraph di atas. Untuk memaksimalkan anggaran yang tersedia dan dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran maka Bappeda Prov. Kaltim melakukan Langkah-langkah konkrit untuk menyelesaikan permasalahan tersebut seperti merasionalisasi dan menggeser beberapa belanja ke belanja yang lebih dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas guna keberhasilan pencapaian sasaran strategis Bappeda.

**BAB III**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA**  
**PERANGKAT DAERAH**

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 sampai dengan triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja serta pagu indikatif yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan

Secara rinci, uraian program dan kegiatan beserta plafon anggaran pada perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1  
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Lokasi	Pagu Indikatif	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>							<b>54.381.973.000</b>	<b>64.749.564.857</b>
<b>5.01.001</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Skor Kepuasan Masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda</b>	<b>Skor Kepuasan Masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>31.338.747.940</b>	<b>36.992.357.258</b>
<b>5.01.001.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Bappeda yang tepat waktu, tepat proses</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Bappeda yang tepat waktu, tepat proses</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>606.750.000</b>	<b>807.098.500</b>
5.01.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	87.810.000	307.145.000
5.01.001.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	31.101.000	48.332.500
5.01.001.1.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	36.358.000	48.905.000
5.01.001.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	132.027.000	167.190.000
5.01.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	319.454.000	235.526.000
<b>5.01.001.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur</b>	<b>Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur</b>	<b>96%</b>	<b>96%</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>18.259.201.608</b>	<b>18.526.900.747</b>

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Lokasi	Pagu Indikatif	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/Bulan	90 Orang/Bulan	Samarinda	17.321.401.608	17.450.140.747
5.01.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	933.121.000	1.072.081.000
5.01.001.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	4.679.000	4.679.000
<b>5.01.001.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase SDM Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi</b>	<b>Persentase SDM Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>667.040.000</b>	<b>243.450.000</b>
5.01.001.1.05.002	Pengadaan Pakainan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	Samarinda	277.040.000	63.630.000
5.01.001.1.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27 Orang	27 Orang	Provinsi dan Luar Daerah	390.000.000	179.820.000
<b>5.01.001.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang Berfungsi Baik</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi baik</b>	<b>95%</b>	<b>95 %</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>3.080.108.000</b>	<b>4.868.022.200</b>
5.01.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	Samarinda	267.843.000	100.034.500
5.01.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	Samarinda	302.648.000	2.077.349.300
5.01.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Samarinda	383.156.000	262.918.200
5.01.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Samarinda	185.953.000	187.368.000



Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Lokasi	Pagu Indikatif	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Pengaturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	Samarinda	59.520.000	60.115.200
5.01.001.1.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	Samarinda	24.912.000	24.912.000
5.01.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	1.485.600.000	1.896.600.000
5.01.001.1.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	Samarinda	370.476.000	258.725.000
<b>5.01.001.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Sarana dan Prasarana</b>	<b>Tersedianya Sarana dan Prasarana</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>Samarinda</b>	<b>546.797.100</b>	<b>1.670.618.300</b>
5.01.001.1.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	Samarinda	546.797.100	1.670.618.300
<b>5.01.001.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat waktu</b>	<b>Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>Samarinda</b>	<b>6.082.224.232</b>	<b>6.845.432.400</b>
5.01.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Samarinda	15.000.000	15.000.000
5.01.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Samarinda	1.465.312.560	1.465.736.400
5.01.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Samarinda	4.601.911.672	5.364.696.000
<b>5.01.001.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang Digunakan dan Berfungsi Baik</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang digunakan dan berfungsi baik</b>	<b>90%</b>	<b>90 %</b>	<b>Samarinda</b>	<b>2.096.627.000</b>	<b>4.030.835.111</b>

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Lokasi	Pagu Indikatif	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.001.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	Samarinda	79.998.000	100.064.000
5.01.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	69 Unit	69 Unit	Samarinda	908.276.000	918.702.000
5.01.001.1.09.005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	Samarinda	19.200.000	19.200.000
5.01.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	Samarinda	53.865.000	144.444.000
5.01.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Samarinda	704.318.000	2.675.925.111
5.01.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	Samarinda	330.970.000	172.500.000
<b>5.01.002</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan</b>	<b>Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan</b>	<b>80%</b>	<b>80 %</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>12.593.225.060</b>	<b>13.085.713.100</b>
<b>5.01.002.1.01</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan</b>	<b>Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan</b>	<b>95%</b>	<b>95 %</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>4.758.439.000</b>	<b>5.202.317.300</b>
5.01.002.1.01.001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJPD/RPJMD	1 Dokumen	1 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	408.600.000	301.898.000
5.01.002.1.01.003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3 Berita Acara	3 Berita Acara	Provinsi dan Luar Daerah	591.431.000	584.861.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Lokasi	Pagu Indikatif	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.002.1.01.005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Murenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	1 Berita Acara	Provinsi dan Luar Daerah	662.181.000	567.335.000
5.01.002.1.01.006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	3.096.227.000	3.748.223.300
<b>5.01.002.1.02</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan</b>	<b>Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan</b>	<b>98%</b>	<b>98 %</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>1.699.999.900</b>	<b>1.779.672.800</b>
5.01.002.1.02.001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data pembangunan	Jumlah dokumen analisis data pembangunan	2 Dokumen	2 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	670.098.400	766.771.300
5.01.002.1.02.002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	92 Orang	92 Orang	Provinsi dan Luar Daerah	578.618.500	578.618.500
5.01.002.1.02.003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	30 Orang	30 Orang	Provinsi dan Luar Daerah	276.818.000	276.818.000
5.01.002.1.02.004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen profil pembangunan daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	174.465.000	157.465.000
<b>5.01.002.1.03</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan</b>	<b>Persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti dalam penyusunan dokumen perencanaan</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>6.134.786.160</b>	<b>6.103.723.000</b>

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Lokasi	Pagu Indikatif	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.002.1.03.001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	3 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	4.407.195.160	4.447.516.000
5.01.002.1.03.003	Monitoring, Evaluasi dan penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	806.985.000	791.985.000
5.01.002.1.03.004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/ Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang difasilitasi/dievaluasi	4 Dokumen	4 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	920.606.000	864.222.000
<b>5.01.003</b>	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase program/kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</b>	<b>Persentase program/kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</b>	<b>95%</b>	<b>95 %</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>10.450.000.000</b>	<b>14.671.494.499</b>
<b>5.01.03.1.01</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA &amp; RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</b>	<b>Persentase program/kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA &amp; RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>2.950.000.000</b>	<b>3.908.669.999</b>
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	670.809.000	631.856.100
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra /Renja Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	259.457.000	346.845.700

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Lokasi	Pagu Indikatif	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	169.734.000	357.962.700
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	925.000.000	1.626.368.499
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	925.000.000	945.637.000
<b>5.01.03.1.02</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA &amp; RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</b>	<b>Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA Dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RENSTRA, &amp; RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</b>	<b>97%</b>	<b>97 %</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>4.600.000.000</b>	<b>7.703.446.500</b>
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	638.974.000	579.498.000
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra /Renja Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	9 Perangkat Daerah	9 Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	182.146.000	177.766.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Lokasi	Pagu Indikatif	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	928.880.000	959.880.000
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	327.330.000	325.329.800
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Perangkat Daerah	3 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	176.970.000	131.827.500
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Dokumen	4 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	2.345.700.000	5.529.145.200
<b>5.01.03.1.03</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA &amp; RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</b>	<b>Persentase Program/kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA &amp; RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</b>	<b>97%</b>	<b>97 %</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>3.059.378.000</b>
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	934.709.000	1.046.429.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Lokasi	Pagu Indikatif	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	1.032.891.000	1.018.849.000
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	932.400.000	994.100.000

## **BAB IV PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan perubahan kebijakan umum anggaran dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi perangkat daerah di tahun anggaran 2023.

Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 16 Agustus 2023

Kepala,  
  
Yusliando  
NIP. 19671005 199803 1 009




Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 32 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. Perubahan RENJA Perangkat Daerah ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
3  
SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa No. 2 Samarinda 75123,  
Telp 0541-742283